

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan komponen penting dalam sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh organisasi untuk menyampaikan kondisi keuangan secara transparan dan akurat kepada pihak internal maupun eksternal. Dalam praktiknya, penyusunan laporan keuangan tidak hanya bergantung pada sistem dan prosedur yang berlaku, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kinerja pegawai yang terlibat dalam proses tersebut. Di berbagai instansi, baik sektor publik maupun swasta, masih ditemukan laporan keuangan yang disusun tidak sesuai dengan standar akuntansi, mengalami keterlambatan, atau mengandung kesalahan pencatatan yang berdampak pada pengambilan keputusan yang kurang tepat.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaannya, laporan keuangan menjadi alat yang sangat vital karena berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik atas penggunaan anggaran yang telah direncanakan. Oleh karena itu, penyusunan laporan keuangan yang akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan standar yang berlaku menjadi sebuah keharusan.

Namun pada kenyataannya, penyusunan laporan keuangan di lingkungan pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya dapat ditemukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sebagai instansi yang memiliki

tanggung jawab dalam mengelola keuangan dan aset daerah, BPKAD seharusnya menjadi ujung tombak dalam memastikan bahwa proses penyusunan laporan keuangan berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan. Akan tetapi, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai permasalahan yang mengindikasikan belum optimalnya kinerja pegawai dalam menjalankan tugas tersebut.

Sebagai instansi yang memiliki peran sentral dalam mengelola keuangan daerah, BPKAD Kabupaten Hulu Sungai Tengah dituntut untuk dapat menyusun laporan keuangan dengan kualitas yang baik. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yang menunjukkan bahwa kinerja pegawai dalam proses penyusunan laporan keuangan belum berjalan secara optimal. Adapun permasalahan yang ditemukan yaitu:

1. Kesalahan dalam proses pencatatan transaksi keuangan yang disebabkan rendahnya tingkat ketelitian pegawai yang bertanggung jawab. Kesalahan tersebut berimplikasi pada terjadinya ketidaksesuaian antara data realisasi keuangan dan laporan keuangan yang disusun, sehingga menurunkan tingkat keandalan dan relevansi informasi keuangan yang dihasilkan sebagai dasar pengambilan keputusan.
2. Penyusunan laporan keuangan sering kali mengalami keterlambatan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan. Keterlambatan tersebut dapat disebabkan oleh kurang optimalnya koordinasi antar unit kerja.
3. Masih terdapat pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, khususnya yang bertugas dalam penyusunan laporan keuangan, yang belum sepenuhnya

memahami prinsip-prinsip dasar akuntansi pemerintahan. Hal ini terutama terlihat pada pemahaman yang kurang terhadap perbedaan antara basis kas dan basis akrual. Padahal, penguasaan terhadap konsep tersebut sangat krusial untuk memastikan bahwa laporan keuangan daerah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Ketiga permasalahan tersebut mencerminkan bahwa kinerja pegawai, baik dari segi kompetensi teknis, ketelitian, maupun pemahaman regulasi, masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini berpotensi menghambat tercapainya laporan keuangan yang andal dan tepat waktu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pegawai dalam penyusunan laporan keuangan serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang relevan. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat judul: **“Kinerja Pegawai dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah”**.

B. Fokus Penelitian

Pada penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada kinerja pegawai dalam penyusunan laporan keuangan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan maka dipilih indikator teori Kinerja menurut Robbins (2016:260) dengan indikator sebagai berikut:

1. Kualitas Kerja
2. Kuantitas

3. Ketepatan Waktu
4. Efektifitas
5. Kemandirian

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja pegawai dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja pegawai dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis kinerja pegawai dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Mengidentifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja pegawai dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilaksanakan ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari aspek keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk pengembangan berbagai teori yang sangat berguna bagi pengembangan pemahaman, penalaran dan pengamatan pada bidang ilmu administrasi

publik, khususnya terkait dengan manajemen kinerja pegawai dan tata kelola keuangan daerah.

2. Manfaat Praktis

Membantu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam meningkatkan kinerja pegawai dan kualitas laporan keuangan, serta memberikan dasar untuk pelatihan terkait pemahaman basis kas dan basis akrual. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan internal, seperti pelaksanaan pelatihan, peningkatan kapasitas pegawai, maupun penerapan sistem penghargaan dan sanksi guna mendorong kinerja yang lebih baik.